

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian pada suatu negara dapat dilihat melalui jumlah pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional dapat diketahui melalui produk domestik bruto atau *gross domestic product*. Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua transaksi, baik berupa barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Muchtolifah, 2008). Salah satu faktor yang terdapat pada produk domestik bruto yaitu konsumsi rumah tangga. Singkatnya, pada konsumsi rumah tangga terdapat dua pihak yang terlibat yaitu konsumen dan produsen. Produsen merupakan pihak yang menyediakan atau memproduksi barang dan jasa agar dapat dinikmati konsumen. Perusahaan merupakan contoh dari pihak produsen. Tentunya setiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuannya, yaitu *going concern*. *Going concern* adalah upaya yang dijalankan oleh perusahaan untuk beroperasi dalam waktu yang sangat panjang dan tidak akan terlikuidasi dalam jangka pendek (Financial Accounting Standards Board, 2014).

Untuk mewujudkan adanya *going concern* pada perusahaan, maka *good corporate governance* penting untuk diterapkan. *Good corporate governance* merupakan serangkaian hubungan antara *agent*, dewan direksi, *shareholder*, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan (The Organization for Economic Co-operation and Development, 2015). Sistem *good corporate governance* mengalami perkembangan selama berabad-abad dan seringkali digunakan sebagai respons untuk menangkap sinyal tentang adanya kegagalan pada suatu perusahaan. Sebagai contohnya British South Sea Company yang terlikuidasi pada tahun 1720. Kejadian tersebut membuat sebuah revolusi untuk memperkuat hukum bisnis dan praktiknya di Inggris

Kejadian yang menimpa British South Sea Company belum cukup untuk menunjukkan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan di seluruh dunia. Hingga akhirnya pada tahun 2001 merupakan titik balik bagi perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan *good corporate governance* dengan baik, yaitu terkuaknya kasus sebuah perusahaan energi terbesar di dunia. Perusahaan energi tersebut bernama Enron Corporation, yang berlokasi pada Amerika Serikat. Sebelum dinyatakan terlikuidasi pada Desember 2001, Enron merupakan salah satu perusahaan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Enron memiliki cakupan bisnis dalam bidang gas alam, listrik, komunikasi, dan kertas yang mempekerjakan kurang lebih sebanyak 21.000 orang pegawai. Sebelum kasusnya terkuak, pada tahun 2000 Enron mengaku penghasilan bersihnya mencapai \$101 miliar. Enron menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia pada akhir tahun 2001 karena laporan keuangan yang selama ini ditunjukkan ke publik tidak sesuai dengan kenyataan. Enron telah tertangkap basah bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya pada laporan keuangan terdapat campur tangan *fraud* yang terencana, sistematis, dan terlembaga. Pada tanggal 30 November 2001, Enron menyatakan terlikuidasi dan peristiwa tersebut merupakan sejarah terbesar kebangkrutan di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Sejak saat itu, Enron menjadi kasus terpopuler dan terbesar yang telah melakukan *fraud* berupa penyalahgunaan laporan keuangan dan korupsi yang dilakukan secara sengaja pada saat itu.

Selain Enron, kantor akuntan publik terbesar pada saat itu, Arthur Andersen, juga dibubarkan karena terlibat skandal dengan Enron. Pada tahun 1980-an, Arthur Andersen merupakan *big five* kantor akuntan publik di seluruh dunia bersama Ernst & Young, KPMG, Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers. Selain itu, Arthur Andersen mengaudit Enron Company yang merupakan perusahaan energi terbesar di dunia sehingga Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik yang berjaya pada masanya. Tetapi, masa kejayaan itu berakhir karena Arthur Andersen terbukti bersalah. Mereka tidak memenuhi tanggung jawab profesionalismenya sebagai auditor. Arthur Andersen juga melanggar kode etik auditor karena mereka tidak menerapkan prinsip independensi. Oleh karena itu, Arthur Andersen dinyatakan

bangkrut karena terkuaknya kasus Enron. Sejak saat itu, hanya tersedia *big four* kantor akuntan publik.

Di Indonesia sendiri, krisis keuangan yang menimpa pada tahun 1997-1998 tidak menimbulkan dampak ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada sektor sosial dan politik. Krisis tersebut menimbulkan nilai rupiah yang terdepresiasi hampir 80 persen dan meningkatkan tingkat kemiskinan secara drastis. Furman dan Stiglitz (1998) menganggap resesi di Indonesia telah dipicu oleh pengawasan sektor keuangan yang sangat buruk dan lemahnya penegakan peraturan dari bank sentral yang berakibat pada praktik perbankan yang buruk. Dikarenakan peristiwa tersebut, kesadaran dan pemahaman komunitas bisnis Indonesia tentang pentingnya *good corporate governance* telah meningkat secara dramatis sejak saat itu. Perubahan ini sesuai dengan adanya kemajuan berkelanjutan yang dilakukan pada kerangka kerja *good corporate governance* yang legal dan teregulasi. Di Indonesia, contoh dari praktik manajemen laba terjadi pada tahun 2005. PT. Kereta Api Indonesia, Tbk (PT. KAI) terbukti memanipulasi laporan keuangan mereka. PT. KAI mencatat laba bersih mereka senilai Rp6,9 Miliar. Namun apabila diulas lebih dalam lagi, PT. KAI malah diketahui mengalami kerugian senilai Rp 63 Miliar.

Laporan keuangan merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan secara keseluruhan. Belkoui (1993) berpendapat jika laporan keuangan menjadi alat untuk menilai dan mencerminkan apa saja yang dikerjakan oleh *agent* atas *resources* yang telah disediakan oleh *principal*. Laba menjadi salah satu tolak ukur yang fundamental pada laporan keuangan karena laba akan dipakai untuk menilai kinerja *agent*. Tetapi, banyak perusahaan yang masih mengimplementasikan manajemen laba. Healy dan Wallen (1999) berpendapat bahwa manajemen laba ada disaat pihak *agent* mempertimbangkan penyusunan transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk mengubah laporan keuangan menjadi terlihat lebih menarik (*window dressing*) sehingga menyesatkan *stakeholder* dan *shareholder* tentang kinerja ekonomi yang ada pada perusahaan. Sedangkan Widyaningdyah (2001) berpendapat bahwa manajemen laba memiliki pengertian dalam arti sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, penentuan metode

akuntansi berkaitan dengan manajemen laba. Manajemen laba adalah sikap *agent* untuk mengubah elemen dari *discretionary accruals* pada penentuan laba. Dalam pengertian yang umum, manajemen laba adalah perilaku *agent* untuk memaksimalkan ataupun meminimalkan laba pada laporan keuangan atas unit yang menjadi kewajiban *agent* tanpa mengundang penambahan atau penurunan *return on asset* jangka panjang pada unit tersebut.

*Good corporate governance* biasanya diterapkan pada ukuran perusahaan yang besar, yaitu yang telah IPO di bursa efek. Basyaib (2007) mengatakan jika ukuran perusahaan ialah skala yang dapat menggolongkan kecil atau besarnya suatu perusahaan yang tercermin pada berbagai macam cara, seperti contohnya melalui total modal, ukuran pendapatan, dan total aset. Keadaan perusahaan yang kuat dicerminkan oleh seberapa besarnya ukuran total modal, pendapatan, dan total aset. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, tentunya perhatian masyarakat akan tertuju pada perusahaan tersebut. Oleh karenanya, perusahaan yang mempunyai ukuran lebih besar akan mudah untuk menaati peraturan yang berlaku dan menghindari praktik manajemen laba karena *stakeholder* dan *shareholder* dapat mengakses lebih banyak informasi yang tersedia tentang perusahaan. Jika mereka tidak menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, maka nilai perusahaan tersebut bisa jatuh.

Menurut Hamdan dan Al-Sartawi (2013) dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa investor institusional akan lebih memilih untuk berinvestasi ke saham perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh McKinsey dan Co (2002), yang menyimpulkan bahwa investor menghindari perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang kurang baik. Untuk memutuskan saham mana yang akan mereka beli, investor tidak hanya melihat pada laporan keuangan perusahaan saja. Poin tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi perhatian tersendiri bagi para investor. Mereka yakin bahwa tata kelola perusahaan yang baik bisa mendongkrak naik nilai perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat menghindari praktik manajemen laba.

Disamping kepemilikan institusional serta publik, terdapat kepemilikan manajerial pada perusahaan. Kepemilikan manajerial ialah bagian dari perusahaan yang dikuasai oleh *agent* yang berasal dari perusahaan tersebut. Dalam pandangan teori akuntansi, motivasi *agent* dapat memunculkan manajemen laba. Dorongan yang berlainan akan membuat praktik manajemen laba yang berlainan, seperti pada *agent* yang menjadi seorang pemegang saham dengan *agent* yang tidak merupakan seorang pemegang saham. Dalam kepemilikan manajerial, *agent* memutuskan prosedur dan keputusan dari metode akuntansi yang hendak diterapkan pada perusahaan. Jika terdapat kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka kemungkinan besar praktik manajemen laba akan menurun karena praktik tersebut dapat merugikan *agent* sendiri, sebagai salah satu pemegang saham dari perusahaan tersebut.

Untuk mencegah adanya praktik manajemen laba, perusahaan diharuskan untuk menerapkan *good corporate governance*. Membentuk komite audit adalah salah satu solusinya. Tugas dari komite audit adalah mendorong diimplementasikannya *good corporate governance* pada perusahaan, membentuk struktur internal kontrol yang memadai dan efektif, memaksimalkan kualitas transparansi dan pelaporan keuangan. Komite audit dibuat oleh dewan komisaris, lalu mereka juga akan melakukan kewajiban mereka pada dewan komisaris. Namun, *good corporate governance* tidak akan berjalan jika komite audit pasif. Oleh karenanya, komite audit harus lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan yang ada pada perusahaan.

Sejalan dengan pertemuan komite audit, pertemuan dewan komisaris juga harus dilaksanakan sesering mungkin. Dewan komisaris diharapkan dapat menjadi pengendali dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada perusahaan. Dewan komisaris juga berkewajiban untuk semua kegiatan yang ada pada perusahaan. Jadi jika ada sebuah kesalahan yang terdapat pada perusahaan, maka dewan komisaris juga akan terlibat dengan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Dengan perannya sebagai pengendali dan mengawasi jalannya semua kegiatan, maka penting bagi dewan komisaris untuk mengadakan pertemuan yang digunakan untuk

membahas perkembangan kegiatan dari perusahaan. Diharapkan jika dewan komisaris mengadakan pertemuan sesering mungkin, perusahaan akan terkendali dengan efektif dan dapat mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan.

Terdapat dua pemikiran yang menghubungkan ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Pemikiran pertama yang berasal dari Watts and Zimmerman (1990) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Mereka menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut juga mempunyai biaya politik yang lebih tinggi. Sehingga efeknya adalah perusahaan tersebut mencari cara untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Dilain sisi, pemikiran kedua bersebrangan dengan pemikiran pertama. Nasution dan Setiawan (2007) beropini bahwa perusahaan berukuran kecil dianggap melakukan lebih banyak praktik manajemen laba karena perusahaan berukuran kecil ingin memperlihatkan kinerja terbaik perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar mereka bisa membuat atraktif hati investor untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Selain itu, peran *whistleblower* yang diterapkan oleh perusahaan berukuran kecil masih belum diterapkan secara efektif. Sebaliknya, masyarakat lebih memantau perusahaan berukuran besar. Pada pandangan masyarakat, perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki kinerja yang bagus. Oleh karenanya, perusahaan berukuran besar melaporkan kondisi perusahaannya lebih akurat karena mereka cenderung berhati-hati karena jika tidak, maka nilai perusahaan yang akan menjadi taruhannya. Hal ini juga didukung berdasarkan laporan ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners, 2020), perusahaan yang karyawannya berjumlah lebih dari 100 orang mempunyai persentase jumlah kasus manipulasi laporan keuangan, termasuk di dalamnya manajemen laba sebesar 10%. Berdasarkan data tersebut dibandingkan dengan *fraud* yang lainnya, pada perusahaan yang berukuran besar manajemen laba masih berada di peringkat empat teratas bersama korupsi, penyalahgunaan aset, dan *billing*.

Perusahaan dianggap memiliki nilai yang lebih oleh *stakeholder* dan *shareholder* apabila perusahaan dapat menjalankan perusahaan dalam jangka waktu

yang lama (*going concern*). Stakeholder dan *shareholder* sama-sama memiliki ekspektasi bahwa perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan baik, sehingga perusahaan tersebut dapat berdiri hingga saat ini. Tentunya, manajemen laba juga erat kaitannya dengan umur perusahaan. Kedua hal tersebut saling berkaitan karena perusahaan yang telah lama beroperasi akan dikenal oleh masyarakat luas sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik, sehingga mereka jarang terlibat dengan manajemen laba karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan mereka kedepannya.

Selain kaitannya dengan umur perusahaan, manajemen laba juga erat kaitannya dengan *leverage*. Perusahaan yang telah *listing* pada bursa efek tentunya mempunyai sumber pendanaan selain menjual saham kepemilikan perusahaan, yaitu sumber pendanaan eksternal berupa hutang. Citra perusahaan tercermin dari usaha perusahaan untuk melunasi hutangnya tersebut. Oleh karenanya, hal tersebut dapat memotivasi *agent* untuk melaksanakan manajemen laba agar dapat melunasi hutang perusahaan dengan tepat waktu. Dechow *et al.*, (1996) menyatakan penyebab manajemen laba masih dilakukan oleh perusahaan adalah untuk memenuhi perjanjian hutang dengan cara melunasinya dan memenuhi kebutuhan pendanaan dari sisi eksternal perusahaan.

Sujarweni (2017) berpendapat bahwa *Return on Asset* dapat diartikan sebagai rasio yang berfungsi untuk menarik laba bersih yang didapat dari modal yang diinvestasikan oleh *shareholder* maupun *stakeholder* melalui wujud aset perusahaan. Adapun menurut Hery (2016), *Return on Asset* sebagai rasio yang menggambarkan kontribusi aset perusahaan dalam memproduksi laba bersih bagi perusahaan. Manajemen laba dan *return on asset* saling berkaitan antara satu sama lain. Bartov *et al.*, (2000) berpendapat bahwa peluang untuk melakukan praktik manajemen laba lebih besar pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena semakin kecil rasio *return on asset* pada perusahaan maka kinerja perusahaan dianggap kurang produktif, seperti yang tercermin dalam *return on asset* dan laporan arus kas perusahaan.

Penelitian dengan topik bagaimana penerapan praktik *good corporate governance* yang di dalamnya termasuk kepemilikan institusional, frekuensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan komite audit pada perusahaan non-perbankan yang terindeks LQ45 pada tahun 2015-2019 untuk mencegah adanya praktik manajemen laba sangat menarik untuk dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, variabel frekuensi pertemuan dewan komisaris dan frekuensi pertemuan komite audit merupakan variabel yang berdiri sendiri. Sedangkan pada penelitian ini, variabel frekuensi pertemuan dewan komisaris dan variabel frekuensi pertemuan komite audit digunakan untuk mencerminkan *good corporate governance* yang masih jarang digunakan pada peneliti sebelumnya.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Iqbal *et al.*, (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Pendapat itu juga disokong pada riset yang dilaksanakan oleh Piosik dan Genge (2020), Khalil dan Ozkan (2016), Nguyen *et al.*, (2020), serta Anggana dan Prastiwi (2013). Di sisi lain, Kamardin (2014) dan Widyastuti (2008) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan Saftiana *et al.*, (2017), Jaggi dan Tsui (2007) dan Drobetz dan Grüninger (2007) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap adanya manajemen laba.

Ilmas *et al.*, (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Pendapat itu juga disokong pada riset yang dilaksanakan oleh Jao dan Pagulung (2011), Jaggi dan Tsui (2007), dan Mehrani *et al.*, (2017). Di sisi lain, Ajay dan Madhumathi (2016), Chatterjee dan Rakshit (2020), dan Das *et al.*, (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Namun, Saftiana *et al.*, (2017), Yang *et al.*, (2009), dan Effendi dan Daljono (2013)

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap adanya manajemen laba.

Susanto (2016) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Pendapat itu juga dibenarkan oleh Gulzar dan Wang (2011), Sherma *et al.*, (2009), Qi dan Tian (2012), serta Wulandari (2011). Namun, Saftiana *et al.*, (2017), Chatterjee dan Rakshit (2020), Pamudji dan Trihartati (2009) dan Prastiti dan Meiranto (2013) menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap adanya manajemen laba.

Sukeecheep *et al.*, (2013) berpendapat bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Pendapat itu juga dibenarkan oleh Mohamad *et al.*, (2012), Prastiti dan Meiranto (2013), serta Alzoubi (2016). Namun, Safitiana *et al.*, (2017), Chatterjee dan Rakshit (2020), Wijaya *et al.*, (2020), dan Prastiti dan Meiranto (2013) menyimpulkan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap adanya manajemen laba.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* yang tercermin berdasarkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan komite audit dan frekuensi pertemuan dewan komisaris terhadap manajemen laba dengan ukuran perusahaan, *return on asset*, *leverage*, dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol.

### 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat macam variabel, yaitu variabel *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial, frekuensi pertemuan dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan komite audit, dengan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, *return on asset* dan *leverage*, serta variabel dependen yang berupa manajemen laba. Populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah perusahaan non-perbankan terindeks LQ-45 pada bursa efek dalam periode 2015-2019 sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut likuid, sehingga data yang ada pada laporan keuangan perusahaan cenderung stabil. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penulis memiliki asumsi bahwa kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu, kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang penjelasan singkat latar belakang penelitian yang mengenai manajemen laba dan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan manajemen laba. Berisi penjelasan singkat tentang *good corporate governance* sebagai variabel independen serta ukuran perusahaan, *leverage*, umur perusahaan, dan *return on asset* sebagai variabel kontrol. Bab ini juga berisikan kasus-kasus yang bertemakan manajemen laba yang pernah terjadi di dunia maupun di Indonesia. Bab ini juga berisikan tentang kesenjangan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, serta sistematika penulisan.

#### Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu teori keagenan, teori akuntansi positif,

manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, frekuensi pertemuan komite audit, frekuensi pertemuan dewan komisaris, umur perusahaan, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on asset* serta beberapa penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis-hipotesis yang dirumuskan oleh penulis.

### Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, metode analisis, teknik sampling, pengukuran variabel, definisi operasional, kriteria populasi serta teknik analisis data yang akan diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan dan analisis regresi berganda adalah metode analisis yang digunakan. Teknik sampling yang diterapkan adalah metode *purposive sampling* dengan menggunakan populasi perusahaan non-perbankan yang terindeks LQ-45 pada bursa efek Indonesia pada periode 2015-2019 sebagai objek penelitian.

### Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran subyek, obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, hasil analisis model penelitian, dan pembahasan yang telah menjawab tujuan penelitian yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba.

### Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian yang menjawab permasalahan dari penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan saran yang diperlukan berkaitan dengan hasil penelitian oleh peneliti selanjutnya.